

**PERANAN KEMITRAAN POLISI REPUBLIK INDONESIA  
DALAM MEMELIHARA STABILITAS KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN MASYARAKAT**

**(Studi Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia**

**Daerah Jawa Timur Resort Ponorogo)**

Djihan Merianingrum

11311797

Pembimbing (I) Ardhana Januar M, S.AP., M.KP

(II) Drs. Eko Herry Suprayitno, M.Pd.

Hasil Penelitian ini di ketahui bahwa Sebenarnya, bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan dan pemberdayaan potensi masyarakat ini ada dua. Yaitu, Pemberdayaan community policing (Polmas) dan Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemitraan Polisi dengan masyarakat salah satunya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, disebabkan oleh karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, seperti pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan informasi. Namun diantara serangkaian hambatan, terdapat juga faktor pendukung yang datang dari pihak masyarakat, semakin banyak warga yang semakin sadar dan peduli terhadap lingkungannya. Sehingga warga setempat secara bersama ikut bergerak dalam menciptakan serta memelihara Kamtibmas.

**Kata Kunci :** *Kemitraan, Polisi, Stabilitas, Masyarakat.*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai organ Negara yang mengemban fungsi kepolisian yang bersifat universal citra Polisi sudah lama menjadi isu dalam masyarakat. Sebenarnya citra itu tidak hitam putih, tetapi merupakan suatu profil atau grafik yang permukaannya tidak rata. Disatu dimensi profil itu menunjukkan tingkat yang rendah, pada dimensi yang lain tinggi (Faturachman, 1995: 57).

Walter C. Reeless (Kunarto, 1995: 24) mengemukakan bahwa “situasi kamtibmas di suatu Negara sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya”. Sehingga menurut hemat saya jika partisipasi masyarakat itu mulai rendah maka gejala atau inti timbulnya permasalahan besar dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan muncul dan berkembang.

Hal inilah yang nampak pada masyarakat sekarang, bahwa tidak jarang masyarakat masih merasa enggan berhubungan dengan pihak kepolisian, merasa takut untuk melaporkan suatu kejadian kepada pihak kepolisian, memberi informasi mengenai gejala kriminalitas dalam lingkungan masyarakat kepada polisi, adanya pandangan negative masyarakat kepada polisi, ketakutan jika berhadapan dengan polisi, apalagi berbincang beradu pendapat dan menjalin suatu kemitraan yang solid antara keduanya. Kesan awam menunjukkan bahwa masih banyak polisi yang dinilai kurang ramah dalam menerima pelapor dalam kantor polisi, kesiapan dalam menerima laporan belum tentu berarti tanggap dengan laporan tersebut, ketanggapan polisi terhadap suatu kasus tergantung pada kasus yang seperti apa dan situasi yang bagaimana yang perlu ditanggapi dan yang kurang perlu ditanggapi segera (Faturochman, 1995: 62).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Kepolisian Sebenarnya ada, tumbuh, dan berkembang, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya peradaban manusia. Setiap kelompok manusia yang memulai merasakan perlunya keamanan, ketentraman, dan mempertahankan kehidupnya, pada saat itulah sebenarnya fungsi polisi itu ada, tumbuh, dan berkembang (Kunarto, 1997: 45).

Selanjutnya Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 1 angka 8 bahwa:

Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan Pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum,

serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

## **METODE**

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Resor Ponorogo, KBO Satbinmas kepolisian resor ponorogo dan tokoh masyarakat wilayah hukum polres ponorogo.

Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumen maupun wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Resor Ponorogo, KBO Satbinmas kepolisian resor ponorogo dan tokoh masyarakat wilayah hukum polres ponorogo.

Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, jurnal dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Kemitraan Polisi Republik Indonesia dengan Masyarakat Dalam Memelihara Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban.**

Kepolisian Resort Ponorogo dalam melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan baik, bentuk kemitraan yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Ponorogo khususnya bagian Bina Masyarakat antara lain pemberdayaan Pemolisian Masyarakat dan pemberdayaan pengamanan swakarsa. Seperti yang dijelaskan oleh Kasat Bina Masyarakat Kepolisian Resort Ponorogo :

“Bagian Bina Masyarakat Kepolisian Resort Ponorogo ini Membentuk Polmas (Pemolisian Masyarakat), penerapan Polmas ini lebih menitik beratkan pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada seluruh aspek warga masyarakat, guna menciptakan jalinan kemitraan yang dinamis antara pihak kepolisian dengan warga masyarakatnya dalam upaya memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan Polmas pada Kepolisian Resor Ponorogo ini lebih khusus ditangani oleh Satuan Bina Masyarakat Polres Ponorogo

yang dalam pelaksanaan kegiatannya tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dan kesadaran tentang keamanan dan ketertiban masyarakat serta menekan pengaruh faktor-faktor kriminogen terhadap munculnya kejahatan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan menerapkan Perpolisian Masyarakat Polri akan menyeimbangkan kegiatan pemberantasan kejahatan yang bersifat reaktif dengan kegiatan yang bersifat proaktif untuk mencegah berbagai kondisi sosial dan ketidaktertiban dalam masyarakat agar tidak berkembang menjadi kejahatan. Satuan-satuan Polri terdepan harus melibatkan warga setempat untuk bersama-sama menangani berbagai masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dan kualitas hidup dilingkungan masing-masing”.

Senada dengan Kasat Bina Masyarakat Tulus Hariyadi, Bentuk Kemitraan Kepolisian Resort Ponorogo dengan Masyarakat Dalam Memelihara Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban masyarakat, juga disampaikan oleh Kbo Satbinmas Kepolisian Resort Ponorogo :

“Efektifitas konsep polmas dalam Menciptakan kamtibmas yang kondusif adalah dengan pembentukan FKPM. Sebagai tindak lanjut dari program Perpolisian Masyarakat tersebut yang telah diuraikan di atas maka perlu dibentuklah suatu wadah atau organisasi guna operasionalisasi Perpolisian Masyarakat tersebut. Wadah tersebut dapat berupa, FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat). FKPM adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, mandiri dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun. FKPM tersebut dapat disebut dengan nama dan istilah lain atau dengan bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan masyarakat setempat. FKPM dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara Kapolsek, Camat/Kepala Desa/lurah dan tokoh masyarakat setempat. Ada pun beberapa bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Ponorogo yang pada khususnya dipegang oleh Bagian Bina Masyarakat Polres Ponorogo diantaranya adalah yang pertama, Membentuk pokdar Kamtibmas “Citra Bhayangkara”, mengukuhkan Pokdar kamtibmas citra Bhayangkara setiap kecamatan se Kabupaten Ponorogo masing-masing kelurahan/desa beranggotakan 5 orang warga setempat Rabu 2 oktober 2013; yang ke-dua Membentuk Forum Komunikasi Pencak silat dan Beladiri (FKPSB) yang dilaksanakan pada 27 oktober 2013 ,sebagai sarana komunikasi silaturahmi antar organisasi pencak silat se Kab. Ponorogo dengan tujuan agar tercipta perdamaian serta untuk memperkecil adanya gesekan antar pesilat. FKPSB dibentuk disetiap

kecamatan diseluruh Kabupaten Ponorogo terdiri 24 perguruan silat; yang ke-tiga Deklarasi damai dan pengukuhan FKPSB diikuti sebanyak 3000 pendekar dari 24 perguruan silat dibarengi dengan penandatanganan MOU deklarasi damai seluruh perguruan yang ada di Ponorogo (28/9/2013); yang keempat Kejuaraan pencak silat antar perguruan “KAPOLRES CUP” diikuti 250 peserta dari 24 perguruan yang ada di Kab. Ponorogo Dilaksanakan pada 29 Nopember 2013 selama 3 hari; yang ke-lima Melaksanakan gelar Dzikir Akbar diikuti 5000 pendekar dari 24 perguruan pencak silat dan beladiri; yang ketujuh Milad FKPSB ke-1 Tahun 2014, menggelar pengajian akbar di Alon-alon Ponorogo dengan menghadirkan Ustadz HM Fikri Haikal Senin 27 Oktober 2014; yang ke-enam Tiada Hari Tanpa Razia (THTR), rasia dilaksanakan setia hari siang dan malam dengan sasaran sajam, senpi, handak, miras lokasi berpindah pindah sesuai hakekat ancaman; yang ke-tujuh Melaksanakan program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan berlalu lintas, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada pelajar sebagai penerus bangsa tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, diikuti 5000 pelajar Sekolah Dasar (SD), SLTP dan SMU se Kab. Ponorogo dilaksanakan Minggu 26 Januari 2014; yang ke-delapan Siaga bencana alam, dengan melaksanakan apel besar siaga bencana diikuti 250 Personel dari Polri, TNI, PLN, POM TNI, BPBD, damkar, satpol PP, Dishub, Dinkes dan PMI Ponorogo dilaksanakan pada hari senin, 16 Desember 2013 di Aloon2 Ponorogo; yang ke-sembilan Bakti Sosial bersama media diikuti anggota Polres Ponorogo dan wartawan dengan melaksanakan pembagian sembako dan perbaikan penampungan air PDAM dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2014”.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan polisi dengan masyarakat.**

Dalam menjalin kemitraan Polisi dengan masyarakat tentunya tidak terlepas dengan berbagai masalah, karena masalah merupakan suatu hal yang harus dicari solusinya agar tercipta suatu jalinan yang harmonis antara pihak Kepolisian dengan Masyarakat. Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polisi Resort Ponorogo yaitu :

“Faktor yang mempengaruhi Kemitraan Polisi dengan masyarakat salah satunya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, disebabkan oleh karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, seperti pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan informasi. Demikian pula sering terjadi kesenjangan partisipasi antara elit penguasa dengan masyarakat

yang kurang mampu pada umumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ukuran sukses bagi suatu kemitraanpun yang bertujuan menciptakan pembangunan di negeri ini adalah dengan besar dan luasnya partisipasi rakyat, bukan hanya sekitar para elit, untuk merencanakan dan mengendalikan perubahan dirinya sendiri”. ( Wawancara dengan Kasat Binmas, Tulus Hariyadi AKP/ 60030422, tanggal 10 April 2015 di Polres Ponorogo, Pukul 10.00-11.19 wib)

Senada dengan hal diatas menurut Kbo.Satbinmas Polisi Resort Ponorogo:

“Selain kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalin kemitraan, seperti tidak dipenuhinya undangan (tidak hadir atau mewakili). Tidak tepat waktu dalam menghadiri undangan, kurangnya transparansi antara masyarakat dan pihak kepolisian setempat, Polri juga memandang bahwa adanya rasio perbandingan yang sangat tinggi antara komunitas masyarakat dengan anggota polri mengakibatkan berjalanya tugas pokok dan fungsi polri dalam memelihara kamtibmas jelas kurang optimal jika harus dilakukan secara tunggal oleh pihak kepolisian, hambatan intern juga dirasakan oleh pihak kepolisian yang diantaranya adalah tidak seimbang nya personil kepolisian dengan jumlah masyarakat yang dibina”. Wawancara dengan Kbo Satbinmas Muhyidin IPTU/60031193, tanggal 10 April 2015 di Polres Ponorogo, pukul 08.30-10.00 wib).

Implementasi Polmas yang dilakukan Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) sudah berjalan baik di semua kelurahan kecamatan kota Ponorogo, Namun di Kelurahan Jingglong Polmas itu tidak difungsikan, karena masyarakat setempat sudah bisa mengatasi sendiri berbagai macam gangguan Kamtibmas yang ada.

Walter C .Reeless (Kunarto, 1995:24) mengemukakan bahwa “situasi kamtibmas di suatu Negara sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya”. Sehingga menurut hemat saya jika partisipasi masyarakat itu mulai rendah maka gejala atau inti timbulnya permasalahan besar dalam dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan muncul dan berkembang.

Seperti hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polisi Resort Ponorogo Tulus Hariyadi Faktor yang mempengaruhi Kemitraan Polisi dengan masyarakat salah satunya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, disebabkan oleh karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, seperti pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan informasi. Demikian pula sering terjadi kesenjangan partisipasi antara elit penguasa dengan masyarakat yang kurang mampu pada umumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ukuran sukses bagi suatu kemitraanpun yang

bertujuan menciptakan pembangunan di negeri ini adalah dengan besar dan luasnya partisipasi rakyat, bukan hanya sekitar para elit, untuk merencanakan dan mengendalikan perubahan dirinya sendiri.

Namun diantara serangkaian hambatan, terdapat juga factor pendukung yang datang dari pihak masyarakat, semakin banyak warga yang semakin sadara dan peduli terhadap lingkungannya. Sehingga warga setempat secara bersama ikut bergerak dalam menciptakan serta memelihara Kamtibmas. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat di beberapa kelurahan kecamatan kota bahwa dari bulan ke bulan gangguan Kamtibmas mengalami penurunan secara signifikan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Adapun Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Resort ponorogo melakukan beberapa trobosan kreatif dalam melakukan kemitraan dengan masyarakat antara lain Membentuk pokdar Kamtibmas “Citra Bhayangkara”, mengukuhkan Pokdar kamtibmas citra Bhayangkara setiap kecamatan se Kabupaten Ponorogo masing-masing kelurahan/desa beranggotakan 5 orang warga setempat dilaksanakan pada Rabu 2 oktober 2013; yang ke-dua Membentuk Forum Komunikasi Pencak silat dan Beladiri (FKPSB) yang dilaksanakan pada 27 oktober 2013, sebagai sarana komunikasi silaturahmi antar organisasi pencak silat se Kabupaten Ponorogo dengan tujuan agar tercipta perdamaian serta untuk memperkecil adanya gesekan antar pesilat. FKPSB dibentuk disetiap kecamatan diseluruh Kabupaten Ponorogo terdiri 24 perguruan silat; yang ketiga Deklarasi damai dan pengukuhan FKPSB diikuti sebanyak 3000 pendekar dari 24 perguruan silat dibarengi dengan penandatanganan MOU deklarasi damai seluruh perguruan yang ada di Ponorogo dilaksanakan pada tanggal 28 september 2013; yang ke-empat Kejuaraan pencak silat antar perguruan “KAPOLRES CUP” diikuti 250 peserta dari 24 perguruan yang ada di Kab. Ponorogo Dilaksanakan pada 29 Nopember 2013 selama 3 hari; yang ke-lima Melaksanakan gelar Dzikir Akbar diikuti 5000 pendekar dari 24 perguruan pencak silat dan beladiri; yang ke-tujuh Milad FKPSB ke-1 Tahun 2014, menggelar pengajian akbar di Alon-alon Ponorogo dengan menghadirkan Ustadz HM Fikri Haikal Senin 27 Oktober 2014; yang ke-enam Tiada Hari Tanpa Razia (THTR), rasia dilaksanakan setia hari siang dan malam dengan sasaran sajam, senpi, handak, miras lokasi berpindah pindah sesuai hakekat ancaman; yang ke-tujuh Melaksanakan program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan berlalu lintas, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada pelajar sebagai penerus bangsa tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, diikuti 5000 pelajar Sekolah Dasar (SD), SLTP dan SMU se Kab. Ponorogo dilaksanakan Minggu 26 Januari 2014; yang ke-delapan Siaga bencana alam, dengan melaksanakan apel besar siaga bencana diikuti 250 Personel dari Polri, TNI, PLN, POM TNI, BPBD, damkar, satpol PP, Dishub, Dinkes dan PMI Ponorogo dilaksanakan pada hari senin, 16 Desember 2013

di Aloun2 Ponorogo; yang ke-sembilan Bakti Sosial bersama media diikuti anggota Polres Ponorogo dan wartawan dengan melaksanakan pembagian sembako dan perbaikan penampungan air PDAM dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2014. Bentuk Pelaksanaan dan penerapan kemitraan polisi dengan masyarakat yang mampu mengikat suatu komunitas secara bersama-sama ternyata cukup efektif memberikan rasa aman pada warga masyarakat, menurunkan angka kejahatan, memudahkan komunikasi polisi dengan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi.

2. Dalam pelaksanaan terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam menjalin kemitraan. Faktor penghambat di antaranya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjalin kemitraan, masih banyak masyarakat awam yang belum sadar akan pentingnya jalinan kemitraan dengan polisi yang cenderung menyalah artikan tujuan dari kemitraan. Disamping itu terdapat faktor pendukung yaitu trobosan kreatif berkenaan dengan hal kemitraan masyarakat wilayah hukum Polres Ponorogo semakin sadar dan peduli terhadap lingkungannya. Sehingga warga setempat secara bersama ikut bergerak dalam menciptakan serta memelihara Kamtibmas. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di beberapa kelurahan kecamatan kota bahwa dari bulan ke bulan gangguan Kamtibmas mengalami penurunan secara signifikan.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Mengenai bentuk kemitraan, Hendaknya Polri lebih meningkatkan cara yang telah dilakukan yakni cara yang lebih humanistic seperti pendekatan-pendekatan individual baik kepada masyarakat maupun kepada tokoh masyarakat. Dengan demikian masyarakat lebih tergugah hatinya untuk berperan aktif dan menjalin kemitraan dengan pihak Kepolisian. Dengan cara yang humanistic, kesadaran dan pemahaman masyarakat dapat lebih ditingkatkan, dan jika kesadaran masyarakat meningkat maka jalinan kemitraan akan tercipta dengan selaras, serasi dan seimbang sehingga tujuan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban akan dengan mudah dapat terwujud.
2. Untuk mengantisipasi faktor yang menghambat tingkat kerendahan partisipasi masyarakat akan jalinan kemitraan ini, Polri hendaknya dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip polmasnya dengan baik sesuai pedoman atau landasan dasar starategi dan impimentasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Upaya penting lainnya juga diperlukan dengan sikap atau cerminan yang terpuji sebagai suri tauladan bagi masyarakat agar pandangan masyarakat tidak buruk lagi terhadap alat Negara ini.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Banurusman. 1995 *Polisi, Masyarakat dan Negara*. Yogyakarta: PT .Bayu Indra Grafika.

- Kunarto. 1995 *Merenungi Kritik Terhadap POLRI*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kunarto. 1997 *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal
- Mukhlis, AS. 2007 *Pedoman forum kemitraan polisi-masyarakat*. Ponorogo: Polri Daerah Jawa Timur Wilayah Madiun Resort Ponorogo.
- Moleong Lexy. 2006 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Th. 2002), Sinar Grafika, Jakarta 2009.